

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Drainase Di Distrik Merauke

Putri Handayani¹, Welhelmina Jeujan², Samuel Atbar³

¹²³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus

Email : phandayani701@gmail.com

Received: 15-07-2026

Accepted: 17-08-2026

Published: 15-09-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke dalam pemeliharaan drainase di Distrik Merauke. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menganalisis fungsi Dinas PUPR Kabupaten Merauke berdasarkan Peraturan Bupati No. 94 Tahun 2018 yang berisikan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan administrasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan ditentukan oleh ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan di lapangan, namun masih dibutuhkannya sumber daya yang memadai. Masih dibutuhkannya kolaborasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pemeliharaan. Selain dari jadwal kegiatan operasional Dinas PUPR dalam pemeliharaan drainase, masyarakat juga harus turut andil dalam menjaga kebersihan lingkungan terkhususnya saluran drainase lingkungannya. Selanjutnya, dalam evaluasi dan pelaporan, selain dari sinergi antara sistem pengawasan Dinas PUPR, masyarakat juga dapat menjadi kolaborator dalam penyampaian informasi dan pengawasan kondisi drainase sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemeliharaan drainase dan pelayanan publik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan administrasi Dinas PUPR didukung oleh kombinasi antara sistem kerja yang terjadwal namun tetap fleksibel dan pengelolaan administrasi yang terstruktur dan akuntabel.

Kata kunci: Fungsi, Dinas PUPR, Drainase, Distrik Merauke

Abstract

This study aims to analyze the functions of the Merauke Regency Public Works and Spatial Planning Agency (Dinas PUPR) regarding drainage maintenance in Merauke District. A descriptive research method with a qualitative approach was employed. The study analyzes the agency's functions based on Regent Regulation No. 94 of 2018, which encompasses policy formulation, policy implementation, evaluation and reporting, and administrative execution. The findings indicate that policy formulation relies on accurately identifying needs in the field, though adequate resources remain a necessity. Active community collaboration is also required for policy implementation and maintenance evaluation; beyond the agency's operational drainage maintenance schedules, the community must play a role in maintaining environmental cleanliness, particularly regarding local drainage channels. Furthermore, regarding evaluation and reporting, the community can collaborate with the agency's oversight systems by providing information

and monitoring drainage conditions, thereby enhancing the effectiveness of drainage maintenance and public services. Finally, the agency's administrative operations are supported by a combination of scheduled yet flexible work systems and structured, accountable administrative management.

Keywords: *Function, Public Work and Spatial Planning Agency, Drainage, Merauke District.*

PENDAHULUAN

Banjir merupakan fenomena alam berupa meluapnya air yang merendam daratan kering, hal ini terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi, sungai yang meluap, atau sistem drainase yang buruk. Banjir dapat berlangsung cepat atau bertahap, sering menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, hingga korban jiwa, serta merupakan salah satu bencana paling umum di berbagai belahan dunia. Penyebab utama dari banjir antara lain adalah faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, dan pasang air laut, serta faktor manusia seperti membuang sampah sembarangan dan minimnya daerah resapan air. Salah satu hal dalam menanggulangi banjir adalah dengan memperbaiki saluran air atau drainase.

Drainase merupakan suatu rangkaian struktur air yang digunakan untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu area, sehingga area tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal (Suripin, 2004). Peran penting sistem drainase adalah menggunakan air hujan untuk mangairi kota. Oleh sebab itu, banyaknya struktur yang dibangun dapat mengurangi zona resapan air karena tertutup oleh pekerjaan konstruksi, sehingga jika terjadi hujan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan genangan air karena air tidak dapat terserap dengan baik. Tentu saja hal ini menjadi bencana bagi sebagian masyarakat yang tinggal ditempat yang rawan banjir.

Drainase merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Keberadaan sistem drainase berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air dari permukaan tanah agar tidak menimbulkan genangan, banjir, kerusakan lingkungan, maupun dampak sosial-ekonomi masyarakat. Namun, banyak daerah di Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait drainase, seperti tersumbatnya saluran akibat sampah, sedimentasi, kurangnya perawatan, hingga pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan drainase belum berjalan secara optimal dan memerlukan koordinasi yang kuat antarinstansi pemerintah.

Drainase perkotaan (*urban drainage*) merupakan bagian dari ilmu drainase yang mempelajari teknis pengeringan wilayah perkotaan yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan lingkungan dan estetika

kawasan kota. Kawasan perkotaan merupakan suatu kawasan yang mempunyai jarak antar bangunan tidak melebihi dua ratus meter dan jumlah penduduk lebih dari dua ribu jiwa Angelakis et al dalam (Saidah, 2021).

Pasal 22 Peraturan Menteri PU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki prasarana drainase yang rusak serta mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana tersebut.
2. Teknik pelaksanaan yang bersih dan aman wajib diterapkan saat melakukan pemeliharaan.
3. Aktivitas pemeliharaan meliputi:
 - a. Perawatan rutin
 - b. Perawatan berkala
 - c. Perbaikan dan
 - d. Perawatan khusus.
4. Perawatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya mencakup kegiatan: pemeliharaan, pengerukan sedimen dari saluran, serta pengangkutan sampah secara manual atau otomatis.
5. Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya mencakup kegiatan: pembilasan, pengerukan sedimen dari saluran, kolam, bak kontrol, gorong-gorong, siphon, kolam penampung, kolam retensi, dan pemeliharaan.
6. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup kegiatan seperti: penggantian atau perbaikan saluran, pompa, dan pintu air; perbaikan tanggul; penggantian atau perbaikan saringan sampah; serta perbaikan kolam penahan, kolam penampung, dan kolam retensi.
7. Kolam retensi diperlukan akibat bencana (bencana alam) atau penurunan fungsi.

Pemerintah sebagai pengelola sistem drainase selain memperhatikan pelaksanaan tata guna drainase, hendaknya juga memperhatikan kegiatan pemeliharaan drainase sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Menteri PU Nomor 12 Tahun 2014 ayat (3) huruf a yang berisi pemeliharaan rutin paling sedikit mengikuti kegiatan : pengangkutan sampah manual atau otomatis, pengerukkan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan (mechanical electrical). Pemeliharaan dilaksanakan guna mencegah kerusakan atau penurunan fungsi drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.

Demi mewujudkan drainase yang baik diperlukan dua hal yaitu

pelaksanaan dan pemeliharaan drainase. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (pre-construction), aktivitas konstruksi (construction), dan uji coba sistem (test-commissioning). Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan rencana.

Gambaran umum kawasan kota menyimpulkan bahwa wilayah kota memiliki kepadatan infrastruktur dan jumlah manusia yang sangat tinggi. Kebutuhan perumahan yang tinggi mengakibatkan konsekuensi dari peningkatan laju pertumbuhan penduduk ditambah dengan beban urbanisasi, yang memicu alih fungsi area di perkotaan sehingga mengurangi kemampuan wilayah untuk meresapkan air sekaligus meningkatkan volume limpasan sehingga menambah beban dari drainase. Beberapa penyebab permasalahan drainase antara lain:

1. Kapasitas yang tidak memadai dimana drainase yang sudah ada tidak mampu lagi menampung volume air hujan dan air laut yang meningkat akibat kepadatan penduduk.
2. Hilangnya daerah resapan air karena berubah menjadi pemukiman, sehingga air hujan tidak terserap dengan baik.
3. Saluran drainase tersumbat sampah yang menyebabkan pendangkalan dan menghambat aliran air.
4. Kurangnya kesadaran warga, masih banyak warga membuang sampah sembarangan yang menjadi salah satu penyebab utama masalah drainase (RRI, 2024).

Drainase Kota Merauke saat ini mengalami masalah serius dan tidak mampu menampung debit air, yang sering menyebabkan banjir. Masalah ini disebabkan oleh kombinasi faktor seperti kepadatan penduduk, penumpukan sampah, dan pendangkalan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai (BWS) telah melakukan normalisasi dan merencanakan desain drainase baru untuk meningkatkan kapasitas penampungan air (Infopapuaselatan, 2025).

Dinas PUPR Merauke merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki mandat dalam pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur publik, termasuk jaringan drainase kota. Peran DPUPR sangat penting dalam memastikan bahwa saluran drainase dapat berfungsi secara optimal, baik melalui kegiatan pemeliharaan rutin, rehabilitasi, normalisasi, maupun peningkatan kapasitas jaringan. Selain itu, koordinasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya menjadi bagian penting dalam efektivitas kinerja dinas tersebut.

Total drainase yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten

Merauke (Saluran Tersier) adalah 137 Ruas Saluran Tersier dengan total panjang 79.021 Meter (Dinas PUPR Kabupaten Merauke, 2026). Dengan titik-titik drainase yang rawan banjir yang menjadi perhatian dalam penelitian ini dan sudah diperbaiki adalah 10 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kel. Seringgu Jaya 6 titik.
2. Kel. Karang Indah 5 titik.
3. Kel. Maro 3 titik.
4. Kel. Mandala 8 titik.
5. Kel. Muli 2 titik.
6. Kel. Rimba Jaya 1 titik.
7. Kel. Samkai 3 titik.
8. Kel. Bambu Pemali 6 titik.
9. Kel. Kelapa Lima 3 titik.
10. Kel. Kamundu 1 titik.

(Dinas PUPR Kabupaten Merauke, 2026)

Sektor perumahan, komersial, dan infrastruktur di Kabupaten Merauke berkembang pesat, menjadikannya pusat utama pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Selatan. Pertumbuhan ini meningkatkan kebutuhan akan sistem drainase yang memadai untuk mengendalikan limpasan air hujan serta mencegah terjadinya genangan air atau banjir. Selain menjamin kelancaran aktivitas sosial dan komersial di kawasan perkotaan, saluran drainase merupakan infrastruktur vital untuk menjaga kenyamanan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Baik kota besar maupun kecil, termasuk wilayah Merauke, sering kali menghadapi masalah terkait air limbah dan limpasan air hujan. Masalah-masalah ini—yang disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang atau pengelolaan serta infrastruktur drainase yang tidak teratur—kerap memunculkan genangan air saat musim hujan tiba. Meskipun setiap kota memiliki karakteristik yang unik, persoalan drainase di suatu wilayah sering kali dianggap sama dengan persoalan yang dihadapi wilayah lain.

Namun, sejumlah masalah terkait sistem drainase Kota Merauke telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Di banyak lokasi—termasuk kawasan permukiman padat penduduk, zona komersial, dan jalan-jalan utama—genangan air masih sering terjadi saat musim hujan. Sedimentasi, penyumbatan saluran akibat sampah, kapasitas drainase yang tidak sejalan dengan perkembangan kota, serta pemeliharaan rutin yang tidak memadai merupakan beberapa penyebab masalah tersebut. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya perhatian lebih serius dari instansi teknis terkait terhadap pengelolaan dan pemeliharaan drainase.

Kota Merauke dan wilayah sekitarnya kerap mengalami genangan

air akibat faktor alam maupun faktor lainnya hampir setiap musim hujan. Penyebab pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kepedulian lingkungan, khususnya terkait pembuangan sampah yang tidak tepat; hal ini menghambat aliran air karena menyumbat selokan, parit, dan saluran drainase. Akibatnya, air meluap dan membanjiri jalan raya serta kawasan permukiman. Penyebab kedua adalah banjir yang dipicu oleh bangunan yang menghalangi aliran air keluar dari saluran drainase. Penyebab ketiga berkaitan dengan fasilitas yang dibangun pemerintah—seperti pintu air, saluran drainase, dan sistem pengelolaan sampah—yang jumlah maupun kapasitasnya masih belum memadai (suara.merauke, 2025).

Kendati demikian, efektivitas pemeliharaan drainase yang dilakukan oleh Dinas PUPR Merauke masih menghadapi sejumlah hambatan. Optimalisasi pengelolaan drainase terkendala oleh berbagai tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan saluran, serta persoalan tata ruang yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengetahui sejauh mana kontribusi DPUPR Merauke dalam pengelolaan drainase selama ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas dari kegiatan pemeliharaan drainase.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengelolaan drainase di kota Merauke dengan judul “Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Saluran Drainase Di Distrik Merauke”.

TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi Organisasi

Kata “*organon*” dalam bahasa Yunani, yang berarti bagian atau struktur, merupakan asal-usul kata “organisasi”. Padanannya dalam bahasa Inggris, yaitu “*organize*” (mengorganisasi), merujuk pada proses menyatukan berbagai bagian yang berbeda untuk menghasilkan satu kesatuan utuh yang mampu menjalankan tugas. Definisi organisasi bervariasi dalam berbagai literatur akademis, tergantung pada sudut pandang para ahli di bidang terkait.

Memenuhi kebutuhan dasar organisasi, menetapkan peran dan tugas, serta memengaruhi individu hanyalah beberapa dari berbagai peran yang dijalankan oleh organisasi. Menurut Terry (1960), fungsi organisasi adalah proses mengorganisasikan kegiatan, membangun hubungan antaranggota, serta menetapkan tanggung jawab dan wewenang guna mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, tujuan organisasi merujuk pada hasil yang ingin dicapai—lebih tepatnya, peningkatan

keterampilan melalui upaya mewujudkan visi dan misi organisasi demi kesejahteraan seluruh anggotanya. Menurut Barnard (1938), tujuan organisasi merupakan sasaran bersama yang dikejar melalui kerja sama di antara para anggota dalam suatu sistem organisasi.

Dinas PUPR Merauke

Dinas PUPR Kabupaten Merauke dibentuk berdasarkan Perda No. 13 Tahun (2018) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Perbup Merauke Nomor 94 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR Merauke, 2025).

Peraturan Bupati Merauke nomor 94 Tahun (2018) tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke terkhususnya tentang bidang sumber daya air dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan teknis sumber daya air, pelaksanaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Air memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
 - b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
 - c. Pengkajian bahan bimbingan teknis dan program kerja meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
 - d. Pengendalian administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Fungsi bidang Sumber Daya Air dalam Peraturan Bupati Merauke nomor 94 Tahun (2018) yang telah dijelaskan di atas menjadi fokus untuk meneliti fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan Drainase di Distrik Merauke.

Konsep Drainase

Kegiatan penyaluran, pengeringan, pengaliran keluar, dan pembuangan air secara kolektif disebut sebagai "drainase." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, drainase didefinisikan sebagai pembuangan atau penyaluran air. Secara umum, drainase dipahami sebagai pendekatan teknis untuk meminimalkan kelebihan air baik yang berasal dari irigasi, rembesan, maupun curah hujan di suatu wilayah geografis tertentu sembari tetap menjaga fungsi wilayah tersebut. Saluran permukaan dan saluran bawah tanah merupakan dua metode yang dapat digunakan untuk mengalirkan kelebihan air ini. Di kawasan permukiman, drainase berfungsi baik sebagai strategi mitigasi banjir maupun sebagai sarana sanitasi untuk mencegah genangan air yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan (Pratama, 2015).

Kerangka Berfikir

Penelitian ini diawali dari fokus kajian utama yaitu analisis Fungsi Dinas PUPR Dalam Pemeliharaan Drainase Di Distrik Merauke. Untuk mengukur dan menganalisis fungsi tersebut, penelitian ini melandaskannya pada Perbup No. 94 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, yang dibedah melalui empat dimensi/indikator utama: (a) Perumusan Kebijakan, (b) Pelaksanaan Kebijakan, (c) Evaluasi dan Pelaporan, serta (d) Pelaksanaan Administrasi. Keempat indikator proses ini dianalisis secara berkesinambungan guna menilai sejauh mana fungsi Dinas PUPR sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan output berupa Tercapainya pemeliharaan drainase yang baik di Distrik Merauke.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih melalui teknik *purposive sampling* terdiri dari 12 orang yaitu Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dan Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan, lima orang Ketua RT dan Masyarakat setempat titik drainase yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana data diperoleh berdasarkan teknik wawancara dan juga dokumentasi. Berdasarkan 137 Ruas Saluran Tersier, 5 titik drainase menjadi fokus dalam penelitian ini dikarenakan masih minimnya pemeliharaan di 5

titik tersebut sehingga rawan terjadinya genang air. Berikut secara rinci hasil penyajian data dalam penelitian ini:

1. Perumusan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merauke mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan drainase berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta laporan atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Setiap laporan mengenai penyumbatan, kerusakan, maupun gangguan fungsi drainase menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan. Selanjutnya, keberlanjutan kebijakan pemeliharaan drainase di Dinas PUPR Kabupaten Merauke didukung oleh dukungan sumber daya dimana keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan drainase sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyediakan anggaran yang memadai, baik untuk mendukung kegiatan operasional maupun untuk menambah jumlah personel di lapangan agar pemeliharaan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak lokasi

2. Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program pemeliharaan drainase oleh Dinas PUPR telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan manfaat nyata dalam mengatasi permasalahan drainase di lapangan. Informan menilai bahwa kegiatan pemeliharaan yang dilakukan mampu mendukung kelancaran fungsi drainase sehingga berbagai permasalahan, seperti penyumbatan saluran dan gangguan aliran air, dapat ditangani dengan lebih baik. Dengan demikian, pelaksanaan program pemeliharaan dinilai telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan fungsi jaringan drainase serta menjadi salah satu upaya yang efektif dalam menjaga kondisi saluran agar tetap berfungsi secara optimal bagi masyarakat. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan Pemeliharaan drainase sangat dipengaruhi oleh rutinitas pelaksanaan kegiatan dan dedikasi petugas di lapangan. Pemeliharaan dilakukan secara konsisten setiap hari kerja sehingga kondisi drainase dapat terus dipantau dan ditangani secara berkelanjutan. Rutinitas tersebut menunjukkan adanya komitmen dari tim Operasi dan Pemeliharaan dalam menjaga fungsi drainase agar tetap optimal. Dengan pelaksanaan yang dilakukan secara terus-menerus, potensi penyumbatan, sedimentasi, maupun gangguan aliran air dapat diatasi lebih cepat, sehingga efektivitas pemeliharaan drainase dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

3. Evaluasi dan Pelaporan

Berdasarkan Hasil penelitian, Dinas PUPR menerapkan sistem monitoring dan pengawasan secara berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan drainase. Sistem ini memungkinkan proses pengawasan berlangsung secara terstruktur, sehingga setiap perkembangan maupun kendala yang terjadi di lapangan dapat dipantau secara sistematis. Dengan demikian, setiap kendala dapat segera dianalisis dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah penyelesaian yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem monitoring dan pelaporan yang diterapkan mendukung efektivitas pengawasan serta meningkatkan responsivitas Dinas PUPR dalam menjaga kelancaran pelaksanaan pemeliharaan drainase. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan pemeliharaan drainase dilakukan dengan menggunakan umpan balik dari masyarakat sebagai indikator utama efektivitas pelaksanaan kegiatan. Laporan awal dari masyarakat menjadi dasar pelaksanaan pemeliharaan, sedangkan ada atau tidaknya laporan lanjutan pada lokasi yang sama digunakan untuk menilai keberhasilan hasil pemeliharaan.

4. Pelaksanaan Administrasi

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemeliharaan drainase mengombinasikan sistem pemeliharaan rutin dengan penanganan berdasarkan kebutuhan di lapangan, sehingga kegiatan pemeliharaan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan mampu merespons permasalahan drainase secara tepat waktu sesuai kondisi yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, pengendalian administrasi yang diterapkan oleh Seksi Operasi dan Pemeliharaan telah mendukung tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemeliharaan drainase. Penerapan administrasi yang sistematis sejak tahap perencanaan hingga pelaporan akhir juga memudahkan proses evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban kegiatan, sehingga pelaksanaan pemeliharaan drainase dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan hasil data yang diperoleh dari wawancara. Data tersebut juga diperkuat dengan temuan dari observasi dan dokumentasi yang dilakukan selama proses penelitian di 5 titik drainase yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. Fokus pembahasan tertuju pada fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke terhadap Pemeliharaan Drainase di Distrik Merauke dengan isi pembahasan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan pemeliharaan drainase di Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merauke disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan dengan mengutamakan laporan masyarakat dan hasil identifikasi kondisi drainase sebagai dasar penentuan prioritas penanganan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan bersifat responsif terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat serta disesuaikan dengan kondisi aktual jaringan drainase.

Selain itu, keberlanjutan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, terutama dukungan anggaran dan jumlah personel. Komitmen pemerintah dalam menyediakan anggaran operasional yang memadai serta penambahan tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjamin pelaksanaan pemeliharaan drainase secara berkesinambungan, efektif, dan mampu menjangkau lebih banyak lokasi yang membutuhkan penanganan.

Keberhasilan perumusan dan implementasi kebijakan pemeliharaan drainase di Kabupaten Merauke tidak hanya ditentukan oleh ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan di lapangan, tetapi juga oleh dukungan sumber daya yang memadai. Sinergi antara proses identifikasi yang berbasis kondisi riil, partisipasi masyarakat melalui penyampaian laporan, serta dukungan anggaran dan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam mewujudkan pemeliharaan drainase yang efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Secara komprehensif, temuan ini mengindikasikan bahwa perumusan kebijakan pemeliharaan drainase di Dinas PUPR Kabupaten Merauke telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Perbup No. 94 Tahun 2018. Meskipun demikian, mekanisme identifikasi masalah yang berfokus pada respons atas keluhan masyarakat menunjukkan belum optimalnya sistem pemetaan dini secara mandiri. Keterbatasan alokasi anggaran dan keterbatasan personil operasional menjadi faktor penentu, sehingga penetapan skala prioritas perumusan program belum mampu menjangkau secara menyeluruh 137 ruas saluran tersier yang ada. Oleh karena itu, perumusan kebijakan ke depan tidak hanya memerlukan penguatan alokasi anggaran, melainkan juga pengintegrasian data pemetaan risiko banjir secara sistematis berbasis partisipasi aktif masyarakat.

2. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan drainase oleh Dinas PUPR Kabupaten Merauke telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan fungsi jaringan drainase. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan secara rutin setiap hari kerja sehingga kondisi drainase dapat dipantau dan ditangani secara berkelanjutan. Rutinitas tersebut mencerminkan adanya komitmen dan dedikasi petugas dalam menjaga kelancaran aliran air serta meminimalkan penyumbatan, sedimentasi, dan gangguan fungsi drainase.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan didukung oleh sistem kerja yang adaptif dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan. Setiap permasalahan terlebih dahulu diidentifikasi untuk mengetahui penyebab utama sebelum ditentukan langkah penanganannya.

Apabila terjadi keterbatasan personel, Dinas PUPR melakukan penggabungan tim, sedangkan apabila kendala berkaitan dengan keterbatasan waktu kerja, dilakukan penyesuaian jadwal atau penambahan waktu pelaksanaan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara fleksibel agar target pemeliharaan tetap dapat dicapai.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan drainase dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan kegiatan, dedikasi petugas, serta kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi kendala secara cepat dan tepat. Kombinasi antara pemeliharaan yang rutin, pengelolaan sumber daya yang adaptif, dan komitmen dalam menjaga fungsi drainase menjadi faktor utama yang mendukung efektivitas pemeliharaan serta meningkatkan kualitas pelayanan Dinas PUPR kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan di lapangan, terdapat kesenjangan (gap) persepsi yang nyata antara pihak dinas dengan masyarakat penerima manfaat. Di satu sisi, Dinas PUPR menjalankan pemeliharaan dengan keterbatasan armada dan tim OP yang terbagi fokus tugasnya di sisi lain, Ketua RT dan warga di kawasan rawan genangan seperti Kelurahan Maro dan Mandala merasakan bahwa pembersihan masih belum merata.

Hambatan internal berupa keterbatasan personel dan hambatan eksternal berupa masih rendahnya kesadaran warga dalam membuang sampah ke saluran drainase mempercepat terjadinya akumulasi sedimen. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan pemeliharaan tidak hanya bertumpu pada keterlibatan Dinas PUPR semata, melainkan sangat bergantung pada efektivitas edukasi publik dan pembentukan kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan secara kolektif.

3. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan pemeliharaan drainase di Dinas PUPR Kabupaten Merauke telah dilaksanakan melalui sistem monitoring, pengawasan, dan pelaporan yang terstruktur serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pengawasan dilakukan secara berjenjang sehingga perkembangan pekerjaan dan berbagai kendala di lapangan dapat dipantau secara sistematis, sementara mekanisme pelaporan yang berjenjang memungkinkan informasi mengenai permasalahan diterima dengan cepat dan segera ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR.

Selain itu, keberhasilan evaluasi pemeliharaan drainase sangat bergantung pada umpan balik dari masyarakat. Laporan masyarakat tidak hanya menjadi dasar penentuan lokasi pemeliharaan, tetapi

juga menjadi indikator untuk menilai efektivitas hasil pekerjaan. Tidak adanya laporan lanjutan pada lokasi yang telah ditangani menunjukkan bahwa kegiatan

pemeliharaan telah memberikan hasil yang efektif, sekaligus mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas PUPR.

Di sisi lain, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang dinamis, seperti perubahan cuaca dan musim, sehingga diperlukan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dalam kondisi tersebut, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting melalui penyampaian laporan, pemberian masukan, serta partisipasi dalam menjaga kebersihan drainase agar hasil pemeliharaan dapat dipertahankan.

Keberhasilan sistem evaluasi dan pelaporan pemeliharaan drainase ditentukan oleh sinergi antara sistem pengawasan internal Dinas PUPR yang terstruktur dengan partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber umpan balik. Kolaborasi tersebut mendukung peningkatan efektivitas monitoring, mempercepat penanganan permasalahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjamin keberlanjutan program pemeliharaan drainase di Kabupaten Merauke.

Temuan mengenai fungsi evaluasi dan pelaporan menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Merauke telah melakukan pengawasan secara berkala melalui monitoring lapangan. Akan tetapi, mekanisme pelaporan dan tindak lanjut evaluasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam saluran komunikasi resmi yang cepat di tingkat kelurahan. Ketidadaan umpan balik (feedback) yang berkala kepada masyarakat dan para Ketua RT menciptakan persepsi bahwa evaluasi berjalan lambat. Guna meningkatkan efektivitas fungsi ini, evaluasi perlu ditransformasikan dari sekadar pelaporan administratif internal menjadi sistem pengawasan partisipatif, di mana masyarakat diberi ruang untuk melaporkan serta memantau perkembangan tindak lanjut perbaikan drainase secara akuntabel dan transparan.

4. Pelaksanaan Administrasi

Pelaksanaan administrasi kegiatan pemeliharaan drainase di Dinas PUPR Kabupaten Merauke telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan adaptif. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan melalui jadwal rutin setiap hari Senin hingga Sabtu sebagai bentuk komitmen dalam menjaga fungsi drainase secara berkelanjutan. Di samping itu, Dinas PUPR juga menerapkan pola

kerja yang fleksibel dengan menyesuaikan lokasi penanganan berdasarkan laporan masyarakat, kondisi lapangan, maupun arahan pimpinan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih responsif terhadap kebutuhan yang muncul.

Dari aspek administrasi, seluruh kegiatan didukung oleh mekanisme pengelolaan administrasi yang tertib, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Setiap tahapan administrasi disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemeliharaan memiliki dasar perencanaan yang jelas, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan administrasi pemeliharaan drainase didukung oleh kombinasi antara sistem kerja yang terjadwal namun tetap fleksibel serta pengelolaan administrasi yang terstruktur dan akuntabel.

Penerapan mekanisme tersebut tidak hanya mendukung kelancaran Pelaksanaan pemeliharaan drainase, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengawasan, mempermudah proses evaluasi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Secara menyeluruh, pelaksanaan administrasi di lingkungan Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Merauke telah berjalan secara terstruktur untuk mendukung akuntabilitas kerja, seperti penyusunan jadwal dan pencatatan kegiatan operasional. Namun, fleksibilitas administrasi yang diterapkan akibat penanganan agenda yang mendesak (survei/kegiatan teknis lain) terkadang mengorbankan konsistensi pelaksanaan administrasi di lapangan. Tertib administrasi ini seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban internal instansi, melainkan juga dimanfaatkan sebagai basis data (database) pencatatan kondisi drainase langsung guna menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran pemeliharaan yang lebih akurat

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian-penelitian terdahulu mengenai pemeliharaan drainase perkotaan pada umumnya cenderung menempatkan tata kelola infrastruktur semata-mata sebagai tugas teknis operasional pemerintah daerah. Berbeda dari studi sebelumnya, kebaharuan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pengintegrasian pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merauke. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Merauke Nomor 94 Tahun 2018 Tentang kedudukan, tugas, dan Fungsi. Penelitian ini memunculkan sudut pandang baru

dengan melihat bahwa efektivitas drainase di Distrik Merauke sangat ditentukan oleh sinergi antara dinas dan masyarakat. Keberlanjutan fungsi saluran air tidak hanya bergantung pada kapasitas operasional dan anggaran Dinas PUPR, melainkan juga pada partisipasi aktif warga, seperti keterlibatan di tingkat RT/RW dalam pengawasan lingkungan dan pencegahan sampah, sehingga menghasilkan model tata kelola infrastruktur perkotaan yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dalam penelitian yang dilakukan peneliti selama di lapangan, pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan drainase di Distrik Merauke berdasarkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 94 Tahun 2018 telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari tindakan pemeliharaan yang masih bersifat reaktif saat terjadi penumpukan sampah atau banjir, serta belum didukung secara maksimal oleh alokasi anggaran, kelengkapan sarana armada, dan pemeliharaan berkala yang terjadwal. Berdasarkan analisis terhadap indikator fungsi organisasi yang diteliti, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberhasilan perumusan dan implementasi kebijakan pemeliharaan drainase di Kabupaten Merauke tidak hanya ditentukan oleh ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan di lapangan, tetapi juga oleh dukungan sumber daya yang memadai.
2. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan drainase dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan kegiatan, dedikasi petugas, serta kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi kendala secara cepat dan tepat.
3. Keberhasilan sistem evaluasi dan pelaporan pemeliharaan drainase ditentukan oleh sinergi antara sistem pengawasan internal Dinas PUPR yang terstruktur dengan partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber umpan balik.
4. Keberhasilan pelaksanaan administrasi pemeliharaan drainase didukung oleh kombinasi antara sistem kerja yang terjadwal namun tetap fleksibel serta pengelolaan administrasi yang terstruktur dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, N. &. (2013). Sistem Perawatan Terpadu (Integrated Maintenance System). Yogyakarta:: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:: Rineka Cipta.
- Arikuntoro. (2002). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (V). PT. Rineka Cipta.

- Atikah, N. (2019). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung. Riau: Universitas UIN Suska Riau. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
- Barnard, C. I. (1938). The Function of The Executive. Cambrigde: Havard University Press.
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke. (2018). Peraturan Bupati Merauke Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke. Merauke.
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke. (2026). Tanggapan Permintaan Data. Merauke.
- DPUPR Merauke. (2025). Struktur Organisasi DPUPR Merauke. Diambil kembali dari DPUPR Merauke: <https://dpupr.merauke.go.id/profil/struktur-organisasi>.
- Fairizi, D. (2015). Analisis Dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang. Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan.
- Gunadarma. (2008). Drainase Perkotaan. Depok. Gunadarma.
- Hasanah, M. F. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Drainase Oleh Dinas Sumber Daya Air/Bina Marga/Bina Konstruksi Kota Medan Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir. Medan: Universitas Medan Area. Fakultas Ilmu Sosial & Politik.
- Infopapuaselatan. (2025). Antisipasi Banjir, Dinas PU Merauke Lakukan Normalisasi Saluran Drainase Di Titik-Titik Rawan Banjir. Diambil kembali dari Infopapuaselatan.com: <https://papuaselatanpos.com/2024/11/25/antisipasi-nanjir-dinas-pu-merauke-lakukan-normalisasi-saluran-drainase-di-titik-titik-rawan-banjir/>.
- Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (2014). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014.
- Mulyanto. (2013). Penataan Drainase Perkotaan. Yogyakarta:: Graha Ilmu.
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke. (2018). Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke. Merauke.
- Pratama, A. (2025). Pemeliharaan Drainase di Kota Pekanbaru. Parlemonter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik.
- Pratama, A. M. (2015). Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Praventy, I. (2024). Peran Human Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Mensosialisasikan Program Pengelolaan Drainase Di Kota Pekanbaru. Riau: Universitas UIN Suska Riau. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.
- RRI. (2024). Normalisasi Drainase Perlu Dilakukan. Diambil kembali dari RRI.co.id: <https://rri.co.id/merauke/vlog/15691/normalisasi-drainase-perlu-dilakukan>
- Saidah, H. D. (2021). Drainase Perkotaan Medan. Yayasan Kita Penulis.
- Sari, E. (2009). Buku Budaya Organisasi. Jayabaya University Press.
- Siagian, S. P. (1980). Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- suara.merauke. (2025). BWS Harapkan Dukungan Pemkab Merauke Untuk Membebaskan Ruang Pemeliharaan Drainase. Diambil kembali dari suara.merauke.go.id: <https://suara.merauke.go.id/post/4883/bws-harapkan-dukungan-pemkab-merauke-untuk-membebaskan-ruang-pemeliharaan-drainase.html>

- Sudrajat, A. (2011). Pedoman Praktis Manajemen Perawatan Mesin Industri. Bandung:: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suripin. (2004). Sistem Drainase Yang Berkelanjutan. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Terry, G. R. (1960). Principle of Management. Homewood: Illinois: Richard D. Irwin.
- Yolanda, E. (2021). Perencanaan Saluran Drainase Metode Rasional (Studi Kasus Saluran Drainase Komplek Universitas Islam Kuantan Singingi). Jurnal Teknik Sipil.